



Analisis Flypaper Effect dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Mediasi Belanja Daerah

Achmad Rizqullah*, Meldona

Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang

Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia

Email: ¹*achmadrizqullah766@gmail.com, ²meldona@akuntansi.uin-malang.ac.id

Email Penulis Korespondensi: achmadrizqullah766@gmail.com

Submitted: 16/12/2022; Accepted: 15/01/2023; Published: 20/02/2023

Abstrak-Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja daerah dalam APBD untuk menambah aset tetap. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Daerah pada pemerintah Kota Bima. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Realisasi APBD Kota Bima selama 17 Tahun mulai dari tahun 2004 sampai tahun 2021, sedangkan sampel penelitian menggunakan 5 tahun, yaitu mulai tahun 2017 sampai tahun 2021. Data sekunder yang digunakan adalah Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kota Bima. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Smart PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, PAD dan DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah, dan Belanja Daerah tidak dapat memediasi pengaruh PAD dan DAU terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan tidak terjadi fenomena flypaper effect pada APBD Pemerintah Kota Bima.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah; Dana Alokasi Umum; Belanja Daerah; Pertumbuhan Ekonomi; Flypaper Effect

Abstract-The regional government allocates funds in the form of regional budgets in the APBD to increase fixed assets. So far, regional spending has been used more for routine spending which is relatively less productive. The purpose of this study is to analyze the effect of Regional Original Income (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Profit Sharing Fund (DBH) on regional Expenditure Allocation in Bima City government. The population of this study is the financial report of the Bima City APBD realization for 17 years starting from 2004 to 2021, while the research sample uses 5 years, which is from 2017 to 2021. The secondary data used in this research is the Bima City Government APBD Realization Report. Hypothesis testing in this study used Smart PLS. Research shows that PAD and DAU have a significant effect on economic growth. However, PAD and DAU have no effect on Regional Spending, and Regional Expenditure cannot mediate the influence of PAD and DAU on economic growth. The results showed that there was no flypaper effect phenomenon in the Bima City Government Budget.

Keywords: Regional Own Revenue; General Allocation Fund; Regional Expenditure; Economic Growth; Flypaper Effect

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, desentralisasi fiskal mulai hangat dibicarakan sejak era reformasi pasca periode orde baru. Dalam perkembangan bangsa Indonesia pada masa reformasi berbagai kebijakan seperti desentralisasi diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal secara resmi berlaku mulai 1 Januari 2001 berdasarkan UU RI No. 22 tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU RI No.23 tahun 2014 (K. S. N. R. Indonesia, 2014). Otonomi daerah merupakan bentuk sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pendelegasian kewenangan kepada daerah mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus; urusan pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Badrudin & Kuncorojati, 2017).

Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat, agar hasil yang dicapai dapat maksimal. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan untuk menggali potensi pendapatan daerah yang terdiri dari dua komponen utama yaitu milik sendiri pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan. Sumber pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan asli daerah pendapatan yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah (Badrudin & Kuncorojati, 2017).

Penelitian Purbarini & Masdjojo (2015), proporsi PAD dalam pembiayaan belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%. Dengan demikian, pemerintah daerah mengandalkan dana alokasi umum (DAU) sebagai sumber utama pembiayaan pemerintah daerah dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya seperti dana bagi hasil (DBH), dana alokasi khusus (DAK), dan PAD. Ketergantungan ini akan menyebabkan rendahnya peran daerah sendiri dalam membiayai belanja pemerintah daerah dan semakin dominan peran transfer dari pemerintah pusat. Hal ini mengakibatkan pemerintah kabupaten memiliki perilaku penggunaan anggaran yang disebut efek flypaper. Menurut Purbarini & Masdjojo (2015) dan (Armawaddin et al., 2017), flypaper effect merupakan respon belanja modal lebih besar untuk dana perimbangan dari pemerintah pusat daripada dari pendapatan asli daerah dari kabupaten. Akibatnya,



pemerintah daerah selalu menuntut transfer yang lebih besar ke pemerintah pusat, daripada mengeksplorasi basis pajak daerah hasil yang optimal (Purnomo, 2011). Situasi ini juga ditemui dalam kasus pemerintahan daerah di Indonesia. Oleh karena itu, DAU sebagai sumber utama harus digunakan efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan daerah pembangunan, dan memaksimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah (Yani Rizal et al., 2021). Flypaper effect adalah kondisi yang terjadi ketika pemerintah daerah merespons pembiayaan lebih (boros) menggunakan dana transfer yang dihasilkan dengan DAU daripada menggunakan kemampuan mereka sendiri yang diproksi oleh PAD (Badrudin & Rimawan, 2015).

Belanja daerah sebagai salah satu bentuk belanja pemerintah daerah di Daerah Anggaran Pemerintah (APBD) merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Manek & Badrudin, 2017). Oleh karena itu, belanja daerah sebagai salah satu kebijakan fiskal instrumen dalam APBD harus digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan secara efektif dan efisien agar mampu meningkatkan perekonomian kegiatan dan laju pertumbuhan ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi daerah (Badrudin & Rimawan, 2015). Hasil riset Tuaputimain (2019) menunjukkan bahwa pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan peningkatan infrastruktur inovasi, tetapi, tingkat efisiensi lokal belanja pemerintah provinsi di luar Pulau Jawa masih kurang. Hal ini merupakan hasil investigasi efisiensi belanja pemerintah daerah di Indonesia, sehingga menetapkan Pembangunan Manusia sebagai output yang penting (Badrudin & Rimawan, 2015).

Transfer mempunyai tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh daerah, serta pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan dan pemeliharaan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah (Adiputra, 2014), namun yang terjadi adalah ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan pemerintah pusat sebagai wujud ketidakmampuan daerah otonom dengan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai belanja daerah yang nantinya diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam Anggraini Putri (2016), pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Terdapat enam ciri pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan pada produk nasional dan komponennya, yaitu: (1) Laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita; (2) Peningkatan produktivitas; (3) Laju perubahan struktural yang tinggi; (4) Urbanisasi; (5) Ekspansi negara maju; serta (6) Arus barang, modal dan orang antar bangsa (Mawarni et al., 2013).

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Dalam pengertian ini terdapat tiga aspek yang ditekankan yaitu pertama, Pertumbuhan Ekonomi adalah suatu proses dan bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa ada aspek dinamis dari suatu perekonomian, yang artinya yaitu suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Kedua, yaitu Pertumbuhan Ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita, di sini terdapat dua aspek penting yang perlu diperhatikan yaitu sisi output total (GDP) dan sisi jumlah penduduk. Aspek ketiga adalah perspektif jangka panjang. Suatu perekonomian tumbuh dalam kurun waktu yang cukup lama, misalnya sepuluh, dua puluh, lima puluh tahun atau bahkan lebih lama lagi. Pertumbuhan Ekonomi akan terjadi apabila ada kecenderungan dari proses internal perekonomian itu atau kekuatan yang berasal dari perekonomian itu sendiri (Sumartini et al., 2014).

Dalam penelitian Vegh & Vuletin (2016), flypaper effect secara luas didokumentasikan sebagai peraturan dalam keuangan publik yang memegang kecenderungan pemerintah daerah untuk menghabiskan dana transfer lebih tinggi dari pada menghabiskan pendapatan sendiri. Salah satu fenomena yang mencolok dari otonomi daerah di Indonesia adalah ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan ini terlihat jelas dari aspek keuangan. Alokasi transfer DAU yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah sangat tinggi dan kurang memperhatikan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendanaannya. Akibatnya pemerintah daerah akan selalu menuntut transfer yang besar dari pemerintah pusat, bukannya memaksimalkan kapasitas fiskal daerah (potensi fiskal). Ketergantungan ini akan menimbulkan rendahnya peran daerah itu sendiri dalam mendanai belanja daerah serta semakin dominannya peran transfer dari pusat dalam hal ini adalah DAU, sehingga disebut flypaper effect (Purbarini & Masdjojo, 2015).

Pada penelitian Al Khoiri (2015) terjadi flypaper effect dalam merespon belanja transfer DAU dan PAD di Pulau Sumatra, ia juga meneliti bahwa flypaper effect berpengaruh untuk memprediksi Belanja Daerah periode ke depan dan juga tidak terdapat perbedaan terjadinya flypaper effect baik pada daerah yang PAD-nya rendah maupun daerah yang PAD-nya tinggi di Kabupaten/Kota pulau Sumatra. Menurut (Subadriyah & Solikul (2018), juga mengadakan penelitian serupa untuk daerah Propinsi Jawa Tengah dan DIY. Hasilnya adalah secara empiris penelitian ini membuktikan bahwa besarnya Belanja Daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari Pemerintah Pusat. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Dalam model prediksi belanja daerah, daya prediksi DAU terhadap belanja daerah lebih tinggi dibanding daya prediksi PAD. Hal ini menunjukkan telah terjadinya flypaper effect.

Kota Bima merupakan kota yang berada paling timur di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang unggul di sektor tersier seperti jasa dan perdagangan, serta kerap kali disebut sebagai "Kota Transit" bagi wisatawan dari Pulau Bali atau Pulau Lombok yang akan berkunjung ke Labuhan Bajo, NTT. Potensi wisata pariwisata Kota Bima sedang digalakkan agar menjadi Daerah Tujuan Wisata (DTW) destinasi wisata bahari yang menonjol dengan historis sejarah yang kental dengan masih terdapatnya beberapa kesultanan maritim. Pengelolaan administrasi keuangan Kota Bima selama kurun waktu 5 tahun terakhir sejak tahun 2017 sampai 2021, Pemerintah Kota Bima menempatkan DAU sebagai penyumbang pendapatan daerah terbesar dengan prosentase mencapai 59% kemudian



DAK 13%, lain-lain pendapatan daerah yang sah 10%, DBH 8% dan DAK 7%. Disaat aloksi DAU yang diperoleh besar, maka pemerintah daerah akan berusaha agar pada periode berikutnya DAU tetap pada porsi nominalnya. Menurut (Al Khoiri, 2015) proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain termasuk PAD. Badrudin & Kuncorojati (2017) juga menyebutkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah sebesar 20%. Respon disini merupakan satu tanggapan langsung dari pemerintah daerah mengenai dana transfer dalam bentuk dana perimbangan khususnya DAU yang diwujudkan dalam belanja daerah. Ketika respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer, maka disebut dengan flypaper effect (Armawaddin et al., 2017). Akibatnya, pemerintah daerah menjadikan dana perimbangan sebagai sumber pendapatan utama dalam membiayai Belanja Daerah (Fadilah & Helmayunita, 2020); (Subadriyah & Solikul, 2018). Berdasarkan fenomena tersebut sehingga peneliti akan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan dimediasi oleh belanja daerah pada pemerintah Kota Bima.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif kuantitatif yang menguji ada atau tidak adanya Flypaper effect. Kemudian juga melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah serta dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Realisasi APBD Kota Bima selama 17 Tahun mulai dari tahun 2004 sampai tahun 2021, sedangkan yang ditentukan sebagai sampel penelitian adalah laporan keuangan Realisasi APBD Kota Bima 10 tahun terakhir, yaitu mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2021.

3.3 Tehnik Pengambilan Sampel

Teknik pengumpulan sampel adalah Non-Probability Sampling yaitu purposive sampling dengan mempertimbangkan kriteria: 1) ketersediaan data dan terupdate. 2) Data tahun 2017-2021 memenuhi kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3.4 Data dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, berupa catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam bentuk arsip, berupa data time series dan cross sectional pada Kota Bima. Data penelitian ini bersumber dari dokumen laporan realisasi APBD yang diperoleh situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui www.djpk.kemenkeu.go.id periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2021. Dari laporan realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan anggaran belanja daerah serta data Pertumbuhan Ekonomi diperoleh di BPS Kota Bima melalui www.bimakota.bps.go.id.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mencatat data-data yang sudah ada (Riyanto, 2012), berupa pengumpulan data realisasi anggaran Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Daerah, Pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari situs website Kementerian Keuangan dan situs Website Kota Bima.

3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu, variabel terikat (dependent variabel) dalam penelitian ini adalah Peretumbuhan Ekonomi sedangkan variabel bebas (independent variabel) adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU), serta yang menjadi variabel Mediasi adalah Belanja Daerah.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Pengukuran	Sumber
1.	Pendapatan Asli Daerah	Pajak daerah + Retribusi daerah + hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + lain-lain PAD yang sah.	UUD No 33 tahun 2004
2.	Dana Alokasi Umum	DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar Dimana, Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal Dana yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah yang bersumber dari pendapatan APBN (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004)	UUD No 33 tahun 2004 dan Aprilla dan Saputra, 2013.
3.	Belanja Daerah	Belanja Daerah = Belanja Operasional + Belanja Modal + Belanja Tidak Terduga	Mardiasmo, 2002



No	Variabel	Pengukuran	Sumber
4	Pertumbuhan Ekonomi	$PE = \frac{PDBt - PDBt - 1}{PDB t - 1}$	Todaro dan Smith, 2011
5	Flypaper effect	Perbandingan proksi DAU lebih besar dari proksi PAD terhadap Belanja Daerah	Tresch, 2002, dalam Rizal 2021

3.7 Model dan Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data metode Structural Equation Model-Partial Least Square (SEM-PLS) dengan WART-PLS. Model persamaan structural (SEM) merupakan suatu teknik analisis multivariate yang menggabungkan analisis faktor dan analisis jalur sehingga memungkinkan penelitian untuk menguji dan mengestimasi secara simultan hubungan antara variabel eksogen dan variabel endogen multiple dengan banyak faktor (Ghozali dan Latan, 2012). Langkah-langkah dalam teknik analisis data yang digunakan dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini yang bertujuan untuk mengevaluasi model dan menganalisis data atau hubungan antarvariabel independen dan variabel dependen berbasis SEM-PLS adalah berikut:

1. Merancang Model Struktural (Inner Model)
2. Merancang Model Pengukuran (Outer Model)
3. Membuat Diagram Jalur (diagram path)
4. Melakukan Estimasi
5. Mengevaluasi model struktural konstruk
6. Pengujian Hipotesis (Resampling Bootstrapping)

3.8 Kajian Teoritis

Teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen yang salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, teori sosiologi dan teori organisasi (Megasari, 2015). Teori prinsipal-agen menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (principal) membuat suatu kontrak baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain (agent) agar agen akan melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang). Dengan kontrak tersebut, masalah yang sering terjadi dengan agen akan dapat diminimalisasi (Fadilah & Helmayunita, 2020).

Berdasar UU No 33 Tahun 2004, Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (S. N. R. Indonesia, 2004). Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi dana umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi dana umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi dana umum relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai.

Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum (DAU) dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. (Suwandika & Yasa, 2015).

Penelitian (Adiputra, 2014) yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh PAD, Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat. Menyatakan bahwa hubungan Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum adalah non linier, positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat. Menurut Anggraini Putri (2016) dan Putri (2016) menyatakan bahwa analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan tidak ada pengaruh antara Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasar UU Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (S. N. R. Indonesia, 2004). Menurut Yani Rizal et al. (2021), PAD merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Chindy Febry et al., 2016) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2001-2013. Hasil riset (Putri, 2016) menunjukkan pengaruh yang positif antara Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di



Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Sementara hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Suwandika & Yasa, 2015) yang meneliti tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Tingkat Pengangguran Di Provinsi Bali yang menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ekonom klasik (Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan Jhon Stuart Mill) mengungkapkan ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: 1) Jumlah penduduk, 2) Jumlah stok barang-barang modal, 3) Luas tanah dan kekayaan alam, dan 4) tingkat teknologi yang digunakan (Badrudin & Rimawan, 2015) dan (Manek & Badrudin, 2017). Lebih lanjut, (Badrudin, 2012) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi kekayaan masyarakat. Peningkatan pendapatan di masyarakat ditandai dengan meningkatnya alokasi pendapatan untuk konsumsi primer, sekunder, dan tersier. Menurut (Safitri, 2021), model Pertumbuhan Ekonomi Indonesia adalah model ekonomi yang berfokus pada merangsang peningkatan pendapatan masyarakat melalui percepatan pertumbuhan sektor ekonomi yang efisien dan dinamis tanpa memperhitungkan dampak negatif pada masyarakat luas seperti menipisnya sumber daya alam, kerusakan sumber daya dan lingkungan. Mempertimbangkan hal ini, maka perlu memiliki perencanaan pembangunan yang tepat dan memberikan perhatian pada kapasitas lingkungan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mawarni, Darwanis, & Abdullah, 2013), (Putri, 2016), (Anggraini Putri, 2016), (Deviani, 2016), (Siska, hendri, & putri, 2016), hasil analisis menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh signifikan positif pertumbuhan ekonomi.

Flypaper Effect merupakan suatu kondisi dimana stimulus terhadap pengeluaran daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer dari Pemerintah Pusat lebih besar dari stimulus yang disebabkan oleh perubahan dalam pendapatan daerah (Anggraini Putri, 2016). Flypaper Effect ini merupakan fenomena utama dalam penelitian ini, dimana flypaper effect juga dapat disebut sebagai suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak (lebih boros) dengan menggunakan dana transfer (grants) yang diprosikan dengan DAU daripada menggunakan kemampuan sendiri, diprosikan dengan PAD.

Oates (1999) dalam (Mawarni et al., 2013) menyatakan bahwa beberapa penelitian mengenai perilaku Pemerintah Daerah dalam merespon transfer Pemerintah Pusat menyimpulkan bahwa respon Pemerintah Daerah berbeda untuk transfer dan pendapatan daerahnya sendiri. Ketika respon Pemerintah Daerah lebih besar untuk transfer dibanding pendapatan daerahnya sendiri maka disebut flypaper effect. Menurut (Maimunah, 2006), flypaper effect adalah suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak menggunakan dengan dana transfer yang diprosikan dengan DAU daripada menggunakan kemampuan sendiri, yang diprosikan dengan PAD. Dalam penelitian (Aprilia & Saputra, 2013), (Al Khoiri, 2015) melakukan penelitian terjadi Flypaper Effect berbeda dengan penelitian dilakukan oleh (Yani Rizal et al., 2021) yang menyatakan tidak terjadi fenomena Flypaper Effect. Menurut (Yani Rizal et al., 2021), flypaper effect secara luas didokumentasikan sebagai peraturan dalam keuangan publik yang memegang kecenderungan pemerintah daerah untuk menghabiskan dana transfer lebih tinggi dari pada menghabiskan pendapatan sendiri.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Deskriptif

Analisis data pada penelitian ini menggunakan hasil statistic deskriptif dan analisis Partial least square (PLS). Untuk hasil analisis data dengan statistik deskriptif dapat ditunjukkan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

	Pendapatan Asli Daerah (dalam jutaan)	Dana Alokasi Umum (dalam jutaan)	Belanja Daerah (dalam jutaan)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
Mean	48.656	457.992	780.400	5.48
Minimum	46.120	442.038	656.830	4.90
Maximum	52.470	481.411	852.960	6.65

3.2 Perhitungan Nilai Goodness of Fit (Inner Model)

Model struktural atau inner model pada kerangka konseptual yang dibangun berdasarkan referensi konsep dan teori disebut fit apabila didukung oleh data empiris. Perhitungan nilai goodness of fit inner model didasarkan pada hasil analisis SEM WarpPLS pada Tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Nilai R-Square Variabel

Variabel	R-square
Pendapatan Asli Daerah	-
Dana Alokasi Umum	-
Belanja Daerah	0.932



Variabel	R-square
Pertumbuhan Ekonomi	0.392

Goodness of fit inner model pada analisis PLS menggunakan ukuran Stone-Geisser Q-Square test yang berupa nilai Q-square predictive relevance dihitung berdasarkan nilai R² masing-masing variabel endogen, yaitu variabel belanja daerah diperoleh nilai RBD² sebesar 0.932 variabel pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai RPE² sebesar 0.392. dengan demikian nilai Q-square predictive relevance sebesar:

$$\begin{aligned}
 Q^2 &= 1 - (1 - RBD^2) (1 - RPE^2) \\
 &= 1 - (1 - 0.932) (1 - 0.392) \\
 &= 1 - (0.08) (0.61) \\
 &= 1 - 0.048 \\
 &= 0.95
 \end{aligned}$$

3.3 Nilai Goodness of Fit model

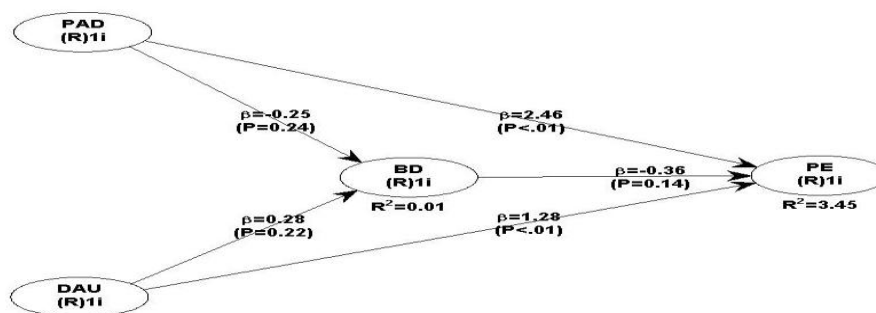
Tabel 3. Hasil Nilai Goodness of Fit Model

Hasil	P value	Kriteria	Keterangan
APC = 0.426	P < 0.001	Good If P < 0,05	Diterima
ARS = 0.499	P < 0.001	Good If P < 0,05	Diterima
AVIF = 2.363		P < 5	Diterima

Hasil menunjukkan dengan nilai P value kurang dari 0,001, sehingga model telah memenuhi kriteria, sehingga dapat digunakan untuk menguji selanjutnya.

3.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh antar variabel eksogen terhadap variabel endogen. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah variabel pendapatan asli daerah dan variabel dana alokasi umum, sedangkan variabel endogennya adalah variabel Belanja Daerah dan Variabel pertumbuhan Ekonomi. Untuk lebih jelas hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar diatas menunjukkan hasil, bahwa terdapat 2 hipotesis yang diterima, sementara 5 hipotesis yang ditolak, dengan dasar memiliki p-value yang tidak signifikan. Koefisien jalur dinyatakan positif apabila koefisien beta (β) bernilai positif. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Analisis SEM

Hipotesis	Pengaruh variabel	Koefisien jalur (β)	p- value	Sig	Temuan	Hasil
H1	PAD-PE	2,46	0,01	Sig	+	Diterima
H2	DAU-PE	1,29	0,01	Sig	+	Diterima
H3	PAD-BD	-0,25	0,24	Tidak sig	-	Tidak diterima
H4	DAU-BD	0,28	0,22	Tidak sig	-	Tidak diterima
H5	BD - PE	0,36	0,14	Tidak sig	-	Tidak diterima
H6	PAD-BD-PE	-0,25	0,14	Tidak sig	Mediasi	Tidak diterima
H7	DAU-BD-PE	0,28	0,14	Tidak sig	Mediasi	Tidak diterima

3.5 Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bima

Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja daerah di Kota Bima. Hasil tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien (β) sebesar 0.24 (positif) dan p-value 0.01 yang lebih kecil dari α 5%. Oleh karena itu hipotesis pertama yang berbunyi PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan Ekonomi adalah didukung. Hal ini



menjelaskan bahwa semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula belanja daerah karena kalau belanja daerah mengalami kenaikan secara tidak langsung aktivitas ekonomi di daerah tersebut akan meningkat dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga bisa memicu pertumbuhan ekonomi.

Hasil pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya Hartati (2009), Prakosa (2015), Al Khoiri (2015), dan Hedyanto (2014) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini berarti semakin tinggi PAD yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, maka semakin meningkat nilai PDRB pemerintah daerah tersebut. Hal ini disebabkan tingkat PAD yang tinggi, maka pemerintah daerah lebih bisa untuk mengoptimalkan potensi PAD tersebut. Karena PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah yang dimiliki.

3.6 Dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bima

Dana Alokasi umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi di Kota Bima. Hasil tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien (β) sebesar 1.28 (positif) dan p-value 0.01 yang lebih kecil dari α 5%. Oleh karena itu hipotesis pertama yang berbunyi DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupaten dan kota di Kota Bima adalah didukung. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi DAU maka semakin meningkat pula Pertumbuhan ekonomi karena kalau Dana Alokasi Umum, mengalami kenaikan secara tidak langsung aktivitas ekonomi di daerah tersebut akan meningkat dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kebutuhan daerah bisa dicapai dengan pembangunan saran dan prasarana.

Hasil pengujian hipotesis kedua ini mendukung penelitian sebelumnya Kusuma dan Rahman (2007), Luluk (2015), Kurnia dan Candra (2013), yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini berarti semakin tinggi DAU yang diterima pemerintah daerah, maka semakin meningkat nilai PDRB pemerintah daerah tersebut. Hal ini disebabkan karena peran DAU sangat signifikan, karena belanja daerah lebih didominasi dari jumlah DAU.

3.7 Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah di Kota Bima

Pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh positif terhadap belanja daerah di Kota Bima. Hasil tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien (β) sebesar 0.25 (positif) dan p-value 0.01 yang lebih besar dari α 5%. Oleh karena itu hipotesis pertama yang berbunyi PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah Kota Bima adalah tidak didukung. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi PAD belum tentu belanja daerah akan ikut naik karena kalau belanja daerah mengalami kenaikan secara tidak langsung aktivitas ekonomi di daerah tersebut akan meningkat dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Daerah yang memiliki PAD tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi (Rahmawati, 2010). PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat (Puspita Sari, 2010). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Pendapatan Asli Daerah sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri, tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat. Berarti ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya. Penurunan kegiatan ekonomi di berbagai daerah juga menyebabkan penurunan PAD daerah sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah secara otonom. Begitu juga sebaliknya peningkatan kegiatan ekonomi di berbagai daerah akan meningkatkan PAD daerah sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah tidak terhambat. Pernyataan Friedmen (dalam Bambang Prakosa, 2004) menyatakan bahwa kenaikan dalam pajak akan meningkatkan belanja daerah sehingga akhirnya akan memperbesar defisit. Hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil daerah itu sendiri, misalnya Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah (Mardiasmo, 2002).

Hasil pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya Hartati (2009), Prakosa (2015), Al Khoiri (2015), dan Hedyanto (2014) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini berarti semakin tinggi PAD yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, maka semakin meningkat nilai PDRB pemerintah daerah tersebut. Hal ini disebabkan tingkat PAD yang tinggi, maka pemerintah daerah lebih bisa untuk mengoptimalkan potensi PAD tersebut. Karena PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah yang dimiliki.

3.8 Dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja daerah di Kota Bima

Dana Alokasi umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kota Bima. Hasil tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien (β) sebesar 0.25 (positif) dan p-value 0.01 yang lebih besar dari α 5%. Oleh karena



itu hipotesis pertama yang berbunyi DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Kota Bima adalah tidak didukung. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi DAU maka semakin tinggi pula belanja daerah karena kalau belanja daerah mengalami kenaikan secara tidak langsung aktivitas ekonomi di daerah tersebut akan meningkat dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dari pemberian dana alokasi umum ini adalah pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan. Jaminan keseimbangan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah (fiscal capacity). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil, namun kebutuhan fiskal besar, akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal (Puspita Sari, 2010) Besar-kecilnya transfer yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), yang termasuk dalam bagian Dana Perimbangan mempengaruhi alokasi belanja langsung. Keberhasilan pengembangan otonomi daerah bisa dilihat dari derajat otonomi fiskal daerah yaitu perbandingan antara PAD dengan total penerimaan APBDnya yang semakin meningkat, diharapkan di masa yang akan datang ketergantungan daerah terhadap transfer dana pusat hendaknya diminimalisasi guna menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah dalam pelayanan publik dan pembangunan.

Hasil pengujian hipotesis empat ini mendukung penelitian sebelumnya Kusuma dan Rahman (2007), Luluk (2015), Kurnia dan Candra (2013), yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini berarti semakin tinggi DAU yang diterima pemerintah daerah, maka semakin meningkat nilai PDRB pemerintah daerah tersebut. Hal ini disebabkan karena peran DAU sangat signifikan, karena belanja daerah lebih didominasi dari jumlah DAU.

3.9 Belanja daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bima

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Kota Bima sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam hal ini belanja daerah yang terdiri dari belanja Langsung dan belanja tidak langsung. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja daerah berpengaruh positif signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota Nusa Tenggara Barat. Hasil tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien (β) sebesar 0.36 positif dan p-value 0.01 yang lebih besar dari α 5%. Oleh karena itu hipotesis kelima yang berbunyi belanja daerah berpengaruh positif pertumbuhan ekonomi di Kota Bima adalah didukung. Hal ini bermakna bahwa apabila terjadi kenaikan nilai belanja daerah maka akan menyebabkan peningkatan pula pada capaian pertumbuhan ekonomi. Sarana dan prasarana infrastruktur ekonomi sebagai modal dasar berkembangnya aktivitas ekonomi serta yang menjadi daya tarik bagi investor merupakan hasil pengadaan aset yang direalisasikan melalui anggaran belanja daerah. Oleh karena itu strategi alokasi anggaran belanja daerah yang tepat sasaran untuk infrastruktur ekonomi akan mampu menjadi trigger/katalis bagi pertumbuhan ekonomi yang optimal.

Hasil pengujian hipotesis kelima ini mendukung penelitian sebelumnya Deviani (2016), Siska (2016) yang mengatakan bahwa belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana bahwa belanja daerah salah satu faktor penentu naik turunnya pertumbuhan ekonomi.

3.10 Belanja Daerah tidak memediasi hubungan Pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan Ekonomi.

Belanja Daerah tidak menjadi mediasi/perantara dalam hubungan antara PAD, terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien beta (β) sebesar -0,25 dengan p-value sebesar 0,14 yang lebih besar dari nilai alfa (α) 0,05. Kesimpulan ini berseberangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Walidi (2009), Muis (2011), dan Afriani et al. (2012). Adapun penelitian dengan kesimpulan yang serupa dengan hasil penelitian ini dilakukan oleh Uhise (2013) dan Amnah (2014).

Pertumbuhan ekonomi terwujud dengan cara meningkatkan dan menciptakan aktivitas ekonomi baru dalam masyarakat sehingga secara makro terjadi peningkatan jumlah output barang dan/atau jasa pada daerah yang bersangkutan yang diikuti pula dengan meningkatnya jumlah uang beredar dari segi pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya hal tersebut akan meningkatkan nilai PDRB dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara sederhana semakin besar nilai uang yang dibelanjakan oleh suatu pemerintah daerah melalui pos belanjanya baik belanja modal ataupun jenis belanja lainnya secara langsung ataupun tidak langsung akan meningkatkan dan menciptakan aktivitas ekonomi baru dan memberikan efek multiplier yang mengarahkan pada meningkatnya PDRB dengan syarat pembelanjaan tersebut dilakukan pada wilayah daerahnya sendiri.

3.11 Belanja Daerah tidak memediasi hubungan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Belanja Daerah tidak menjadi mediasi/perantara dalam hubungan antara DAU terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien beta (β) sebesar 0,28 dengan p-value sebesar 0,14 yang lebih besar dari nilai alfa (α) 0,05. Kesimpulan ini berseberangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Walidi (2009), Muis (2011),



dan Afriani et all. (2012). Adapun penelitian dengan kesimpulan yang serupa dengan hasil penelitian ini dilakukan oleh Uhise (2013) dan Amnah (2014).

Pertumbuhan ekonomi terwujud dengan cara meningkatkan dan menciptakan aktivitas ekonomi baru dalam masyarakat sehingga secara makro terjadi peningkatan jumlah output barang dan/atau jasa pada daerah yang bersangkutan yang diikuti pula dengan meningkatnya jumlah uang beredar dari segi pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya hal tersebut akan meningkatkan nilai PDRB dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

3.12 Terjadi fenomena flypaper effect kabupaten dan kota di Kota Bima

Fenomena flypaper effect Berdasarkan hasil pengujian bahwa proksi dana alokasi umum terhadap belanja daerah lebih kecil dari proksi pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di Kota Bima Hal ini dapat dilihat dari keofisien (β) dana alokasi umum sebesar 0.22 sedangkan keofisien (β) pendapatan asli daerah sebesar 0.25 dan memiliki nilai tingkat signifikan sama-sama 0,01 lebih besar dari taraf signifikan yang ditentukan 5% atau 0,05 yang berarti proksi DAU lebih kecil daripada proksi PAD sehingga dikatakan bahwa tidak terjadi fenomena flypaper pada Kota Bima sehingga terlaksananya otonomi daerah dengan tujuan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat sudah bisa dikatakan sukses

Hasil pengujian hipotesis kedelapan ini mendukung penelitian sebelumnya Kuncoro (2004), Maemunah (2006), Masdjojo dan Sukanto (2009), Afrizawati (2012), Aprilia dan Saputra (2013), Sidiq (2016) yang menyatakan bahwa dana transfer dalam hal ini DAU lebih kecil dari PAD sehingga tidak terjadi Fenomena Flypaper Effect.

4. KESIMPULAN

Berdasar hasil analisis dapat disimpulkan bahwa: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi di Kota Bima, Hal ini terjadi karena semakin tinggi PAD maka akan semakin bagus pertumbuhan ekonomi di Kota Bima, semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut juga akan meningkat. Karena jika PAD meningkat, pemerintah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi yang ada dengan cara memberikan belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan daerah, sehingga jika pembangunan daerah tersebut baik akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang baik pula.

Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi di Kota Bima Hal tersebut membuktikan bahwa apabila semakin tingginya pengalokasian realisasi DAU yang diberikan dari pemerintah pusat dapat mengurangi laju pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan karena DAU secara keseluruhan tidak digunakan untuk peningkatan ekonomi daerah. Hal ini karena peran dari DAU sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, karena tujuan penting dari alokasi DAU adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemda di Indonesia.

Pendapatan Asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah di Kota Bima, Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka pengeluaran pemerintah atas Belanja Daerah belum tentu juga akan semakin tinggi. Pada penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak signifikan dapat disebabkan karena adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak diikuti dengan peningkatan Belanja Modal.

Dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja daerah di Kota Bima Dana Alokasi Umum (DAU) memungkinkan daerah tidak menggunakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah. Dari olah data dan hasil yang diperoleh mengindikasikan bahwa DAU diperuntukkan untuk digunakan belanja daerah dan hanya sedikit untuk membiayai pengeluaran rutin seperti untuk belanja pegawai.

Belanja Daerah tidak berpengaruh pertumbuhan ekonomi di Kota Bima, ini menunjukkan dimana belanja daerah tidak menopang daya beli pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat. Hal tersebut bisa berjalan dengan baik jika ada kerjasama antar satuan kerja untuk mengalokasikan belanja sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing agar memberikan dampak yang langsung terhadap masyarakat dan merangsang pertumbuhan ekonomi.

Belanja Daerah tidak mampu menjadi mediasi/perantara dalam hubungan antara PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. PAD terlebih dahulu akan dialokasikan terlebih dahulu ke dalam Belanja Modal yang akan digunakan sebagai pembiayaan pembangunan daerah dan kemudian akan mempengaruhi tingkat Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini mengharuskan pemerintah daerah untuk memaksimalkan penggunaan dana PAD yang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan daerahnya sendiri.

Belanja Daerah tidak mampu menjadi mediasi/perantara dalam hubungan antara DAU terhadap pertumbuhan ekonomi. DAU tidak dapat mempengaruhi Belanja Modal suatu daerah karena pemerintah daerah kurang memaksimalkan penggunaan dana dari pemerintah pusat untuk alokasi Belanja Modal. Meningkatnya penerimaan bantuan dana DAU dari pemerintah pusat tidak diimbangi dengan pengalokasian dana yang akan digunakan sebagai pembiayaan pembangunan daerah sehingga DAU tidak dapat mempengaruhi tingkat Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah.

Hasil penelitian ini tidak menunjukkan terjadinya fenomena Flypaper effect karena proksi dau lebih kecil daripada proksi Pendapatan asli daerah di Kota Bima, Ini menunjukkan bahwa pemerintah kota bima sudah tidak lagi



memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat, ini menunjukkan juga bahwa Kota Bima sudah bisa dikatakan sebagai daerah kemandirian bagus.

Sebagai saran untuk penelitian-penelitian yang akan datang adalah: (1) peneliti selanjutnya dapat menambah lingkup objek penelitian menjadi lebih besar seperti wilayah provinsi, misalnya Nusa Tenggara Barat; (2) peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel kemiskinan, pengangguran, kesejahteraan masyarakat dan ketimpangan distribusi pendapatan sehingga mendapatkan hasil pembangunan yang komprehensif.

REFERENCES

- Adiputra, I. M. P. (2014). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika (JINAH)*, 13(2), 1232–1261.
- Agustin, Ririn Pratiwi. (2014) hubungan antara produktivitas kerja terhadap pengembangan karir pada karyawan pt. Bank mandiri tarakan : *ejournal psikologi*, 2014, 2 (1): 24-40
- Al Khoiri, R. H. (2015). Flypaper Effect Dan Belanja Daerah Di Propinsi Jawa Barat. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(2), 211–230. <https://doi.org/10.15408/sjie.v4i2.2306>
- Anggraini Putri, S. (2016). Pengaruh Belanja Daerah dan PMDN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 4(3), 1–7.
- Aprilia dan Saputra, “Pengaruh Flypaper Effect, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia,” *jurnal Akuntansi* , vol. 3, no. 2, 2013.
- Armawaddin, M., Rumbia, W. A., & Afiat, M. N. (2017). Analisis Flypaper Effect Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 18(1), 77–91. <https://doi.org/10.21002/jepi.v18i1.773>
- Badrudin, R., & Kuncorojati, I. (2017). the Effect of District Own-Source Revenue and Balance Funds on Public Welfare By Capital Expenditure and Economic Growth As an Intervening Variable in Special District of Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 19(1), 54–59. <https://doi.org/10.9744/jmk.19.1.54-59>
- Badrudin, R., & Rimawan, M. (2015). The Flypaper Effect as Political Budget to Achieve Economic Growth in Eastern Indonesia. *International Journal of Trade and Global Markets*, 15(3), 276–390.
- Bambang, Riyanto. 2012. *Dasar-dasar Pembelanjaan*, Edisi 4, Yogyakarta: BPF
- Chindy Febry, R., Luntungan, A. Y., & Niode, A. O. (2016). ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2001-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(02), 243–254.
- Darmayasa dan Suandi, “Faktor penentu alokasi belanja modal pemerintah daerah,” dalam *simposium nasional akuntansi* , Padang , 2014
- Deviani, “analisis belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendidikan (studi empiris kota dan kabupaten) di Sumatra Barat ,” *Pekbis Jurnal* , vol. 8, no. 1, pp. 1-13, 2016
- Fadilah, H., & Helmayunita, N. (2020). Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 3144–3159. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i3.273>
- G. Wandira, “Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal,” *Accounting Analysis Journal* , vol. 2, pp. 44-51, 2013.
- Ghozali, *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*, Semarang : Badan Penerbit Univ Diponegoro , 2014.
- Indonesia, K. S. N. R. (2014). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 (Undang Undang No 23 tahun 2014)*.
- Indonesia, S. N. R. (2004). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 (UU No 33 tahun 2004)*.
- Junaidi, “Asimetris pada flypaper effect : bukti empiris pemanfaatan dana alokasi umum pada pemerintah daerah di indonesia,” *jurnal akuntansi dan keuangan Petra*, vol. 14, no. 1, pp. 45-55, 2012
- Maimunah, “Flypaper effect pada dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera,” *simposium nasional akuntansi* , pp. 23-26, 2006
- Manek, M., & Badrudin, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Telaah Bisnis*, 17(2), 81–98. <https://doi.org/10.35917/tb.v17i2.49>
- Masdjoko, G.N. and Sukartono, S. (2009) ‘Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2008’, *Telaah Manajemen* , Vol. 6, No. 1, pp.42–54
- Mawarni, Darwanis, & Syukriy, A. (2013). Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Volume 2,(November 2019), 80–90.
- Megasari, I. A. G. S. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Dan Flypaper Effect Pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 20(2), 130–137.
- Paramartha dan Budiasih, “analisis flypaper effect, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus pada belanja modal,” *e jurnal akuntansi* , vol. 15, no. 2, 2016
- Prasetyo, E. P. (2012). *Dampak Alokasi Dana Desa pada Era Desentralisasi Fiskal terhadap Perekonomian Daerah di Indonesia*. Disertasi. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Purbarini, E., & Masdjoko, G. N. (2015). Flypaper Effect on Operating Expenditure and Capital Expenditure of the City Government in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 16(1), 75. <https://doi.org/10.23917/jep.v16i1.939>
- Purnomo, H. B. (2011). Flypaper Effect Pada Pengaruh Transfer Tidak Bersyarat Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota Di Kalimantan Tahun 2007-2010. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1.
- Putri, Z. E. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Esensi*, 5(2), 173–186. <https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2340>



- Safitri, M. I. D. (2021). Analisis Dampak Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Jawa Timur. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 85–96. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.339>
- Subadriyah, & Solikul, H. (2018). Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Optimum*, 8(2), 183–194.
- Sumartini, N. K. A., Yasa, I. G. W. M., & Jurusan. (2014). Pengaruh Pad Dan Dau Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 4(4), 258–271.
- Suwandika, P. E., & Yasa, I. N. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(7), 794–810.
- Tuaputimain, Y. (2019). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah. *Gorontalo Accounting Journal*, 2(2), 65. <https://doi.org/10.32662/gaj.v2i2.615>
- Vegh, C. A., & Vuletin, G. (2016). Unsticking the Flypaper Effect Using Distortionary Taxation. *National Bureau of Economic Research Working Paper Series*.
- Yani Rizal, Safuridar, & Muhammad Ayub Siregar. (2021). Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(2), 133–145. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i2.4223>
- Sidik, djoko, ismail dan adriansyah, *Desentralisasi Fiskal*, jakarta : Bunga Rampai , 2015.
- Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Syukri, “pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi daerah terhadap Anggaran belanja modal Kabupaten dan Kota di provinsi Sulawesi Selatan,” *Management and accounting* , vol. 2, no. 2, 2019.
- Shiddieqy, Ash Hasnan. Afriana, Amalia Rizki. 2013. Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Kota Dan Kabupaten Di Pulau Kalimantan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol.6 No.2.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta
- Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. 2011. “Pembangunan Ekonomi”. Edisi Kesembilan. Jakarta: Erlangga.
- www.bimakota.bps.go.id
- www.djpk.kemenkeu.go.id